

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Target Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun infrastruktur permukiman dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 tahun 2015-2019. Terdapat tiga output prioritas nasional di bidang Cipta Karya untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, yaitu pelayanan air minum, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan sanitasi. Pemerintah menetapkan target terhadap indikator outcome 2015-2019 yaitu 100% capaian pelayanan akses air minum, 0% permukiman kumuh di kawasan perkotaan, dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan *Key Performance Indicators* 100-0-100 yang berguna sebagai aktualisasi visi Cipta Karya demi mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan pada 5 tahun ke depan.

Permukiman kumuh yang tumbuh di kota-kota di Indonesia pada umumnya diakibatkan oleh laju urbanisasi yang cepat sehingga cenderung akan bertambah luas dalam waktu yang relatif singkat. Ciri-ciri permukiman kumuh di kota ditandai antara lain, kepadatan penduduk yang tinggi, lingkungan permukiman yang tidak dilengkapi prasarana sanitasi lingkungan seperti saluran drainase dan pembuangan sampah, rumah yang berkepadatan tinggi, ruangan yang sempit, kurangnya penghawaan dan pencahayaan, ketidakteraturan garis batas sempadan bangunan, kualitas bahan bangunan rendah, dihuni oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan dan pendidikan rendah

Menurut Kurniasi (2007) Permukiman kumuh adalah permukiman dengan kondisi (bangunan) rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Bangunan rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Pada dasarnya kemunculan lingkungan permukiman kumuh diakibatkan karena adanya daya tarik daerah perkotaan yang memiliki tingkat pelayanan fasilitas kota yang tinggi, lowongan pekerjaan, pendidikan dan kemudahan jangkauan. Daya tarik tersebut semakin diperkuat oleh adanya pengaruh dari wilayah desa (*non-urban*) yang dimana rendahnya fasilitas tingkat pelayanan, ketersediaan lapangan

perkerjaan yang terbatas, sulitnya pengembangan perekonomian dan makin berkurangan lahan produktif. Kedua faktor di atas mempengaruhi keinginan penduduk desa untuk berpindah ke Kota yang pada akhirnya menimbulkan banyak masalah, yang berawal dari rendahnya pengetahuan, keterampilan, modal dan kesadaran yang mereka miliki.

Salah satu usaha penanganan kawasan permukiman kumuh adalah dengan melibatkan masyarakat yang mendiami kawasan kumuh tersebut. Partisipasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menjadi kekuatan dan pendorong yang efektif. Sehati (2010) dalam Butar (2012:2) mengatakan bahwa pendekatan partisipasi dalam upaya penataan lingkungan permukiman kumuh diperlukan karena mampu mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang memfokuskan permintaan lokal, perubahan perilaku dan mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharannya. Sementara itu Myrdal (dalam Conyers, 1994: 154) dalam penelitian Sulaiman (2005:4) berpendapat bahwa para penguasa elite menyadari bahwa kecil sekali harapan adanya perencanaan yang efektif dalam pembangunan, bila tanpa dukungan masyarakat.

Keberhasilan program penataan lingkungan permukiman kumuh sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan, yang pada menanggapi dan memanfaatkan permukiman tersebut. Masyarakat akan lebih mempercayai program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pengembangannya, sehingga diantara mereka tumbuh rasa memiliki terhadap proyek tersebut (Conyers, 1994 dalam Sulaiman, 2005:5). Alinsky dalam Sulaiman (2005:5) mengatakan bahwa jika masyarakat meraih keberhasilan dalam program pembangunan yang mereka tangani, mereka akan merasa bahwa usahanya berharga.

Kabupaten Blitar sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Timur dinilai memiliki indikasi terdapatnya kawasan permukiman kumuh. Hal tersebut terwujud berdasarkan tingkat kelengkapan sarana prasarana yang kurang memadai pada beberapa titik di wilayah Kabupaten Blitar. Untuk meningkatkan mutu kehidupan yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berupaya agar mampu melakukan pengurangan terhadap wilayah kumuh di Kabupaten Blitar yang salah satunya dituangkan melalui Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 138/432/409.012/KPTS/2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Prioritas Permukiman di Kabupaten Blitar. Pada SK ini dijelaskan mengenai penetapan lokasi kawasan prioritas permukiman kumuh yang perlu untuk dibenahi dan segera ditangani.

Pada tahun berikutnya 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar kembali menerbitkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/334/409.012/KPTS/2016 tentang Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Blitar. SK tersebut berisi mengenai

penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagai upaya penyempurnaan dari SK yang dikeluarkan pada tahun 2015. Deliniasi kawasan permukiman kumuh yang disebutkan didalam SK Bupati Kabupaten Blitar terdiri atas wilayah kelurahan sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Penetapan Lokasi permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati
Kabupaten Blitar

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)		
SK Bupati 2015					
1	Wlingi	Babadan RW 2 RT 1,2	1,81		
		Tangkil RW 2 RT	0,86		
		Tangkil RW 6	3,96		
		Wlingi RW 2 RT 3	2,51		
2	Kanigoro	Kanigoro RW 4 RT 6	1,32		
		Kanigoro RW 7 RT 2	3,21		
		Satreyan RW 7 RT 1, 3	6,08		
		Satreyan RW 8 RT 1, 2	10,45		
SK Bupati 2016					
1	Wlingi	Babadan	7,6		
		Tangkil	12,5		
		Wlingi	11		
		Beru	6,3		
		Balerejo	5,3		
		Klemunan	12		
		Ngadirenggo	3,27		
		Tegalasri	8,5		
		Tembalang	8		
		2	Kanigoro	Kanigoro	84,7
Satreyan	53,95				
Jatinom	26,7				
Karangsono	26,7				
Kuningan	5,78				
Bangle	64				
Sawentar	136,2				
Tlogo	13,3				
Gaprang	10,1				
Gogodeso	12,7				
Minggirsari	35,8				
Papungan	5,68				
3	Srengat			Kandangan	41
				Srengat	41
		Kauman	1,75		
		Dandong	7		
		Kendalrejo	5		

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
		Maron	20
		Ngaglik	25,5
		Purwokerto	33
		Selokajang	26,7
		Wonorejo	20,56
		Dermojayan	51
		Karanggayam	23
4	Sutojayan	Sutojayan	13,7
		Kalipang	57,5
		Kedungbunder	7,54

Sumber : SK Bupati Kabupaten Blitar

Penelitian ini berlokasi pada Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. Kondisi kekumuhan di Kelurahan Kalipang diakibatkan karena padatnya bangunan permukiman yang menyebabkan terbentuknya kawasan kumuh. Salah satu permukiman terpadat dan kumuh berada di belakang Pasar Lodoyo. Pembangunan rumah di kawasan tersebut saling berhimpit, tanpa adanya jarak antar bangunan. Bahkan, terdapat rumah yang tidak mempunyai teras, dan ada pula rumah yang terasnya diperuntukkan sebagai kandang ayam, sehingga menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan kumuh. Selain itu, pembangunan perumahan yang berada di kawasan pertanian juga semakin menggerus lahan pertanian yang ada di Kecamatan Sutojayan. Kawasan pertanian yang seharusnya terbebas dari pembangunan, malah diperuntukkan untuk kawasan perumahan, hal ini terjadi di sepanjang jalan Basuki Rahmat, yang termasuk daerah tepi kota. Pembangunan rumah pada sepanjang jalan Kelud juga tersebar dari ujung barat hingga timur, sehingga rumah-rumah tersebut terlihat tidak teratur jika dilihat berdasarkan garis sempadan bangunannya. Berdasarkan hasil observasi selain masalah pada bangunan permukiman masalah pada penyediaan sarana dan prasarana permukiman juga muncul pada kelurahan ini contohnya: masalah sanitasi, masih terdapat beberapa bangunan rumah yang belum memiliki kloset dan buang limbah rumah tangga mereka langsung ke sungai yang mengakibatkan sungai menjadi kotor dan bau. Infrastruktur permukiman seperti jalan lingkungan, drainase rusak dan pengolahan sampah juga menjadi faktor bertambah kumuh.

Beberapa program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dalam menata lingkungan permukiman kumuh di Kecamatan Sutojayan, merupakan proyek-proyek fisik dan non-fisik yang kegiatannya meliputi pemasangan paving pada jalan lingkungan, pembangunan saluran drainase, sosialisasi tentang limbah sanitasi, bantuan material untuk merenovasi beberapa rumah yang tidak layak huni, pelatihan peningkatan ekonomi (ekonomi kreatif) masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang infrastruktur permukiman kumuh dan keterlibatan masyarakat perkotaan dalam penataan lingkungan permukiman kumuh yang dilihat dari segi bentuk partisipasi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan ditambah dengan arus migrasi yang tinggi pada kawasan perkotaan menyebabkan tidak terkontrolnya pembangunan lingkungan permukiman. Pembangunan kawasan permukiman tidak hanya mementingkan bangunan rumah saja, tetapi juga perlu memperhatikan ketersediaan infrastruktur permukimannya mulai dari jalan, drainase, air bersih, pengolahan persampahan, sanitasi dan sampai penanganan bahaya kebakaran. Selain itu dibutuhkan juga partisipasi aktif dari masyarakat yang menempati permukiman tersebut sehingga sarana dan prasana yang telah tersedia dapat terpelihara dengan baik demi kesejahteraan bersama.

Dalam perda Kabupaten Blitar No 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 mengutip amanat pembangunan nasional berupa: akses air minum 100%, kawasan kumuh perkotaan 0 Ha, dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Sebagai upaya mempercepat mempercepat visi dan misi pembangunan Nasional, maka pemerintah daerah harus mensinergikan segala potensi dan sumberdaya untuk mendukung amanat tersebut.

Permasalahan pada lingkungan permukiman kumuh di kelurahan Kalipang adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan dan peningkatan kualitasnya. Pada hal ini manfaat yang ingin didapatkan dari pembangunan yang berlandaskan partisipasi masyarakat adalah bahwa masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan perbaikan, sehingga kehidupannya dapat terarah. Untuk pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana kondisi infrastruktur permukiman kumuh yang ada saat ini?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh di kelurahan Kalipang?
3. Bagaimana penanganan infrastruktur permukiman kumuh di Kelurahan Kalipang

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menentukan prioritas penanganan infrastruktur lingkungan permukiman kumuh dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan penelitian seperti yang disebutkan di atas, maka sasaran dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi infrastruktur lingkungan permukiman kumuh di kelurahan Kalipang
2. Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di kelurahan Kalipang
3. Menentukan prioritas penanganan infrastruktur permukiman kumuh berdasarkan bentuk partisipasi masyarakat di kelurahan Kalipang

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian akan dibahas menjadi 2 ruang lingkup yaitu, ruang lingkup lokasi dimana merupakan batasan lokasi yang akan membahas tempat dilakukannya penelitian serta dasar pemilihan lokasi penelitian, sedang ruang lingkup materi adalah merupakan batasan-batasan materi sebagai dasar penelitian ini.

1.4.1 Ruang Lingkup Lokasi

Kelurahan Kalipang terdiri dari 3 lingkungan (dusun) dan 7 RW dengan luas 2,44 Km² berada pada ketinggian 132 *Mdpl* dan memiliki curah hujan 1276 mm/tahun. Batas administrasi kelurahan Kalipang adalah sebagai berikut: (keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada peta 1.1 dan peta 1.2.)

- Timur : Kelurahan Kelurahan Jinglong dan Kelurahan Sukorejo
- Selatan : Kelurahan Sutojayan
- Utara : Kelurahan Kembangarum dan Kelurahan Jegu
- Barat : Kelurahan Kedungbunder dan Kelurahan Pandanarum

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini perlu diberikan batasan-batasan yang berhubungan dengan Penentuan prioritas penanganan infrastruktur permukiman kumuh perkotaan berdasarkan bentuk partisipasi masyarakat di kelurahan

Kalipang. Pada bentuk partisipasi masyarakat peneliti tidak akan melakukan identifikasi melalui program pemerintah yang pernah dilakukan di kecamatan sutujayan. Jadi, peneliti hanya mengidentifikasi berdasarkan variabel penelitian bentuk partisipasi masyarakat. Batasan materi pada penelitian ini hanya mencakup:

1. Variabel infrastruktur permukiman (bangunan gedung, jalan, drainase, sanitasi, air bersih, persampahan, dan penanganan bahaya kebakaran).
2. Variabel bentuk partisipasi masyarakat (bentuk partisipasi ide/pikiran, tenaga, harta benda, dan kreatifitas).

Adapun materi yang ingin dikaji dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi kondisi infrastruktur permukiman kumuh berdasarkan referensi terkait infrastruktur permukiman kumuh dan karakteristik permukiman kumuh yang dilihat dari Permen PUPR NO 02/PRT/M/2016
2. Identifikasi bentuk partisipasi masyarakat di lokasi penelitian dengan menggunakan variabel penelitian yang berdasarkan hasil kajian pustaka.
3. Penentuan prioritas penanganan infrastruktur permukiman kumuh berdasarkan bentuk partisipasi masyarakat pada RW kawasan kumuh.

1.5 Keluaran dan Kegunaan Yang diharapkan

1.5.1 Keluaran Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada sub bab sebelumnya, keluaran yang diinginkan oleh penulis berupa:

1. Deliniasi kawasan permukiman kumuh pada lokasi penelitian
2. Identifikasi kondisi infrastruktur lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kalipang
3. Identifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kalipang
4. Menentukan prioritas penanganan infrastruktur permukiman kumuh berdasarkan bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Kalipang

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari penelitian “Penentuan Prioritas Penanganan Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan Bentuk Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar” akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini untuk memberikan dan menambah wawasan peneliti terkait bentuk partisipasi masyarakat di kawasan permukiman kumuh perkotaan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama.

2. Bagi Pembaca
Sebagai bahan pustaka untuk memperkaya pengetahuan akan teori infrastruktur permukiman kumuh dan teori partisipasi masyarakat.

1.5.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi atas dua bagian yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara akademis. Agar lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Secara teoritis,
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan referensi dari sisi teoritis maupun non praktis, serta kepada pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, untuk mengetahui cara melakukan penelitian pada infrastruktur lingkungan permukiman kumuh perkotaan yang dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat
2. Kegunaan Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan infrastruktur permukiman dan bentuk partisipasi masyarakat di lingkungan kawasan kumuh, terlebih bagi para pakar di bidang ilmu sosial yang ingin meneliti meneliti lebih lanjut.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. BAB I Pendahuluan
Pada bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran yang diharapkan, dan sistematika penulisan penelitian.
2. BAB II Tinjauan Pustaka
Pada bab ini berisikan hasil penelusuran kepustakaan ilmiah, dasar-dasar teori terkait yang akan diteliti, dan perumusan landasan penelitian.
3. BAB III Metode Penelitian
Menjelaskan jenis pendekatan, lokasi dan waktu, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode Analisa data, dan kerangka kerja penelitian.
4. BAB IV Gambaran Umum

Berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan reduksi data hasil observasi lapangan dan kuisioner, mulai dari kondisi infrastruktur permukiman dan bentuk partisipasi masyarakat di kelurahan Kalipang.

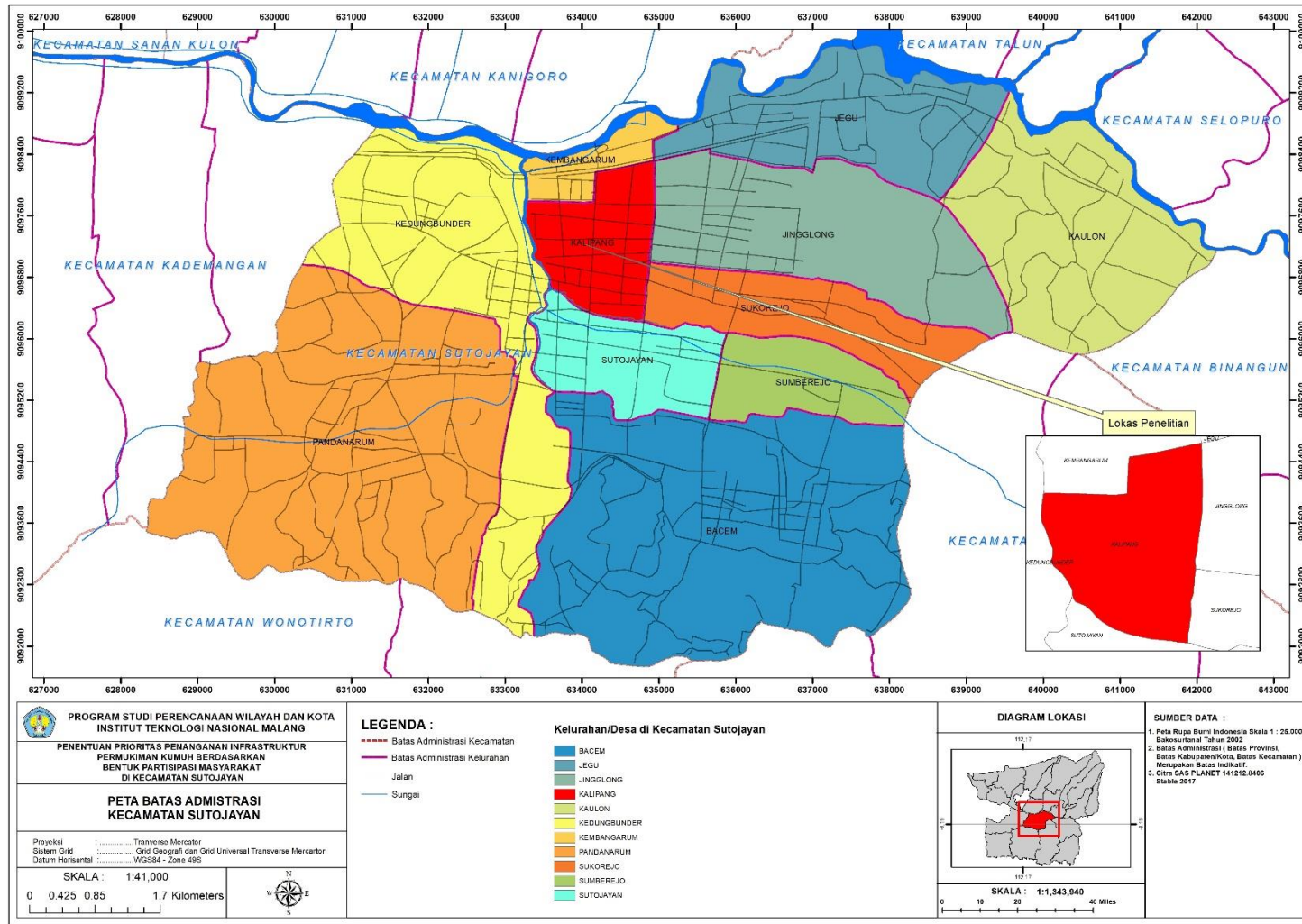
5. **BAB V Analisa**

Berisikan tentang hasil Analisa penelitian berdasarkan hasil survei.

6. **BAB VI Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Peta 1. 1 Orientasi Lokasi Penelitian



Peta 1. 2 Lokasi Penelitian

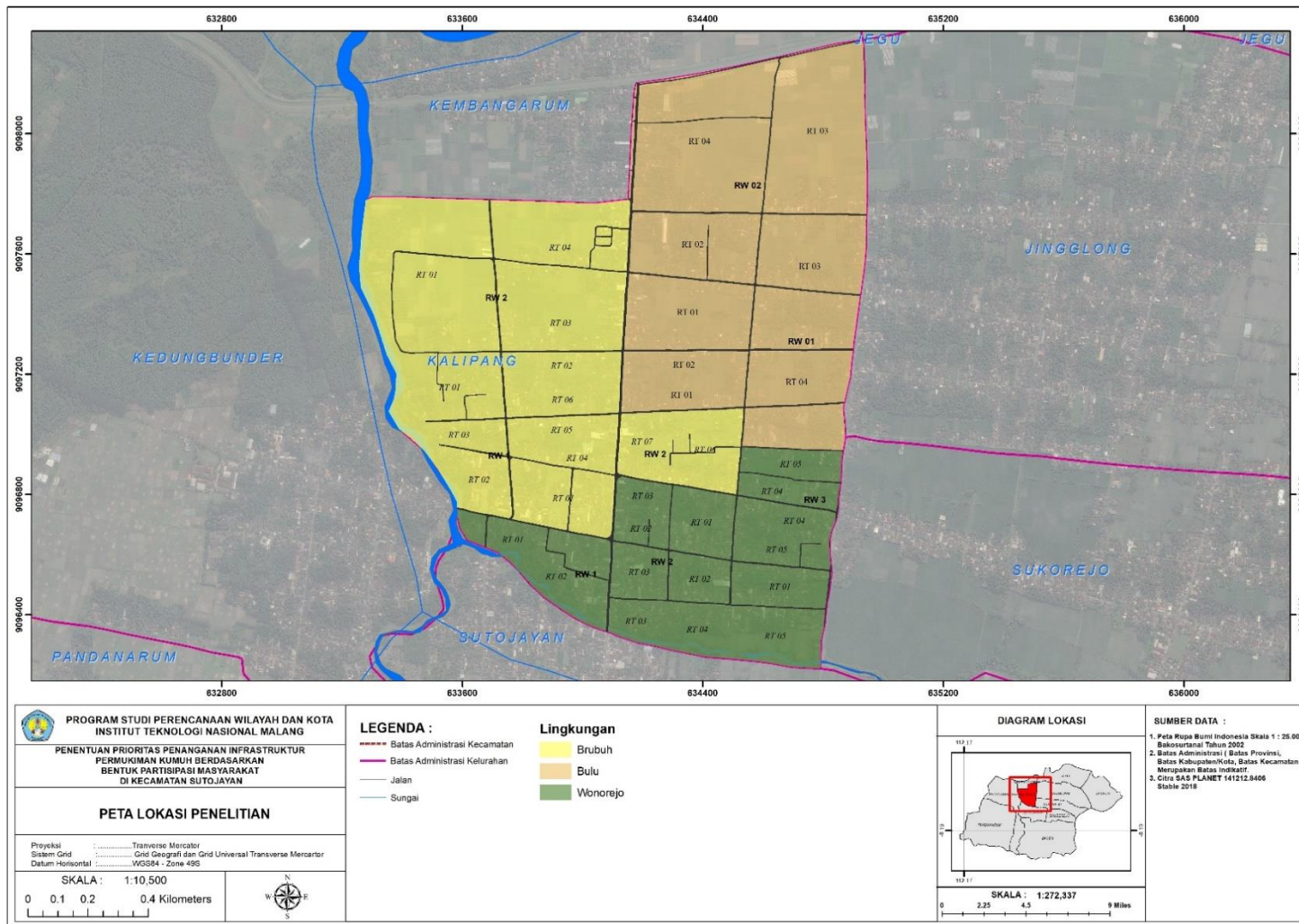


Diagram 1. 1 Kerangka Pikir

